



**PAPARAN**  
**MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG PULAU SULAWESI**

**Pada Acara**  
**MUSYAWARAH SULAWESI II**  
**BADAN KERJASAMA PEMBANGUNAN REGIONAL SULAWESI (BKPRS)**

**MANADO, 6 DESEMBER 2003**

*Para Menteri Kabinet Gotong Royong*  
*Para Gubernur se-Sulawesi*  
*Para Undangan lainnya yang Berbahagia,*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
*Salam sejahtera bagi kita semua dan Selamat Pagi.*

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara **Musyawarah Sulawesi II** yang diselenggarakan oleh **Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS)**. Kami sangat menyambut baik diadakannya acara ini, karena musyawarah ini memiliki arti penting yang relevan dengan upaya kita

bersama untuk terus memantapkan **aliansi** dan **sinergi** pembangunan lintas sektor dan lintas daerah di Sulawesi sebagai pilar pelaksanaan otonomi daerah yang kokoh. Adapun landasan strategis yang dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan aliansi dan sinergi pembangunan di Sulawesi berdimensi jangka panjang, sebagaimana telah kita sepakati bersama adalah **Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi**. Secara spesifik, acara hari ini merupakan momentum yang baik dalam rangka persiapan memasuki tahap implementasi dari pembangunan wilayah di Sulawesi.

*Bapak, Ibu serta hadirin yang saya hormati,*

Penyiapan Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sulawesi menurut hemat kami sangat penting, karena kami menyadari besarnya potensi sumberdaya yang dimiliki Sulawesi, serta pentingnya peran Sulawesi sebagai *prime mover* percepatan pembangunan Kawasan Timur Indonesia. Penyiapan RTR Pulau Sulawesi tidak lain merupakan salah satu upaya kita bersama untuk mewujudkan visi masyarakat Sulawesi 2020, yakni *masyarakat yang sejahtera dan beradab, bertumpu pada kemandirian lokal dan semangat solidaritas kawasan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

Kami berkeyakinan bahwa visi yang telah dicanangkan tersebut akan tercapai bilamana pembangunan diselenggarakan secara lebih **efektif dan efisien** berdasarkan rencana tata ruang. RTR Pulau dalam konteks ini merupakan *common platform* bagi daerah-daerah di Sulawesi, sektor-sektor terkait, termasuk dalam berinteraksi dengan dunia internasional dalam hal perumusan kebijakan pembangunan, penetapan kepastian strategi promosi investasi berdasarkan potensi sosial-ekonomi yang ada, pengurangan resiko konflik antar-sektor dan antar-wilayah yang mungkin terjadi, serta dalam pelestarian fungsi kawasan-kawasan lindung.

Prakarsa penyiapan RTR Pulau Sulawesi sesungguhnya telah dimulai sejak tahun 1994 silam oleh Pemerintah Pusat, sehingga dalam 1 (satu) dekade

terakhir telah dilakukan upaya penyusunan, pembahasan dan penyempurnaan substansi rencana. Sejak memasuki era otonomi daerah, persiapan RTR Pulau Sulawesi ini semakin intensif dilakukan yang melibatkan unsur-unsur provinsi, kabupaten dan kota, karena substansi RTR Pulau Sulawesi pada dasarnya merupakan **titik-temu** antara kepentingan nasional yang termuat dalam RTRWN dan kepentingan daerah yang termuat dalam RTRW Provinsi, Kabupaten dan Kota di Sulawesi. Untuk itulah pada tanggal 22 Pebruari 2001, di ruang dimana kita saat ini berada, telah ditandatangani kesepakatan antara **Depkimpraswil sebagai Sekretariat Tim Teknis Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN)** dengan **Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi (BKPRS)** mengenai persiapan Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi. Kesepakatan ini tidak lain merupakan cerminan komitmen kita bersama untuk menyelesaikan proses yang telah cukup lama dilakukan dan telah banyak menyerap energi dan sumberdaya tersebut.

Sejak penandatanganan kesepakatan tersebut, telah banyak usaha yang diberikan untuk menyiapkan substansi RTR Pulau Sulawesi yang dibahas secara intensif pada berbagai *event* BKTRN maupun maupun *event* di daerah yang difasilitasi oleh BKPRS. Kami menilai bahwa substansi teknis yang dituangkan kedalam rancangan Keppres RTR Pulau Sulawesi **secara prinsip telah selesai, sehingga kini sudah saatnya untuk disepakati oleh daerah-daerah dan sektor-sektor terkait**. Saat ini kita berharap, jika rancangan Keppres ini dapat segera ditetapkan maka Sulawesi merupakan wilayah yang pertama di tanah air yang memperoleh legitimasi rencana tata ruang pulaunya sebagai landasan strategis dalam pelaksanaan pembangunan di Sulawesi, baik bagi daerah-daerah maupun sektor-sektor terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Pada saat ini, konsep Rancangan Keppres RTR Pulau Sulawesi tengah dievaluasi oleh instansi terkait anggota BKTRN, serta pemerintah daerah di Sulawesi. Untuk itu, kami mendorong seluruh provinsi di Sulawesi

dibawah koordinasi para Gubernur, agar Rancangan Keppres dapat **disosialisasikan** kepada *stakeholders* di Kabupaten/Kota baik melalui tatap muka langsung, media cetak, maupun media virtual internet. Selanjutnya, kami mohon agar berbagai *feedback* atau tanggapan yang diberikan terhadap Rancangan Keppres RTR Pulau Sulawesi dapat segera diteruskan pada kami agar proses penyempurnaannya dan penetapan status hukumnya dapat berlangsung dengan cepat.

*Hadirin dan para peserta Musyawarah Sulawesi yang berbahagia,*

Pada bagian akhir, sesuai dengan lingkup dan bidang tugas Depkimpraswil yang saya pimpin, maka kami senantiasa memiliki **komitmen jangka panjang** untuk mengimplementasikan RTR Pulau Sulawesi melalui perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana bidang Kimpraswil, yang meliputi sumberdaya air, jalan, serta prasarana dan sarana perkotaan, seperti air bersih, air limbah, drainase, dan persampahan untuk pemantapan fungsi kota.

Untuk prasarana dan sarana sumberdaya air, kami akan memberikan perhatian dalam bentuk program-program penanganan pada SWS yang diprioritaskan, seperti **SWS Ranowangko – Tondano, SWS Jeneberang, SWS Bolango – Bone dan SWS Saddang**. Program-program tersebut akan diarahkan untuk menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan irigasi pada sentra-sentra pangan, pusat-pusat permukiman, kawasan industri, kawasan pariwisata dan pembangkit listrik tenaga air. Program pembangunan dan pemeliharaan dam baru, seperti **Tinondo, Batubesi, Larona dan Bilibili**. Selain itu program juga diarahkan untuk menghindari terjadinya fluktuasi aliran permukaan yang ekstrim pada musim kering dan musim hujan, serta untuk merehabilitasi dan mencegah terjadinya pendangkalan danau-danau besar, seperti **Danau Tempe, Danau Limboto, Danau Tondano, dan Danau Poso**.

Untuk prasarana dan sarana jalan, maka Depkimpraswil akan memberikan perhatian yang memadai bagi pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan ruas-ruas jalan pada **3 (tiga) jalan lintas, Barat, Tengah, dan lintas Timur**, khususnya yang berfungsi arteri primer. Adapun pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan ruas-ruas jalan baru tersebut kami maksudkan untuk membuka keterisolasian dan mengatasi kesenjangan pembangunan antar wilayah, untuk menghubungkan daerah selatan dan utara yang relatif lebih berkembang, dan untuk meningkatkan aksesibilitas dari kawasan pusat produksi ke outlet-outlet pemasaran.

Pengembangan prasarana dan sarana perkotaan pun akan menjadi perhatian kami yang akan difokuskan pada **kota-kota prioritas**, baik Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), maupun Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pengembangan sistem permukiman dengan pendekatan **agropolitan** di Sulawesi akan pula menjadi perhatian Depkimpraswil dalam rangka mendukung produktivitas dan daya saing wilayah yang berbasis kegiatan budidaya pertanian, perkebunan, dan perikanan yang memiliki prospek baik. Keseluruhan upaya yang akan menjadi perhatian Depkimpraswil, pada dasarnya diarahkan untuk pemantapan fungsi kota-kota, termasuk untuk pemantapan peran kota-kota sebagai **pusat pertumbuhan wilayah**.

Selain hal-hal yang telah diutarakan diatas, Depkimpraswil pun akan mengintensifkan upaya-upaya **mobilisasi investasi** prasarana dan sarana bidang Kimpraswil ke wilayah Sulawesi, serta meningkatkan **manajemen asset**, baik asset manusia maupun sumberdaya lainnya.

*Bapak, Ibu serta hadirin yang saya hormati,*

Pada kesempatan yang bersejarah ini kami ingin mengingatkan kembali bahwa keberhasilan perwujudan visi masyarakat Sulawesi 2020 yang

dicita-citakan sangat bergantung pada **komitmen dan kebersamaan** kita semua, baik sektor maupun daerah, baik eksekutif maupun legislatif, untuk memberikan energi daya dorong yang positif bagi pelaksanaan pembangunan Sulawesi yang lebih efektif dan efisien. Mulai tahun 2004, upaya kita seyogyanya dapat dicurahkan pada penyiapan pelaksanaan **program-program pembangunan strategis secara konkrit** berikut pengendaliannya, sebagai wujud implementasi Keppres mengenai Rencana Tata Ruang Pulau Sulawesi yang akan segera kita tetapkan.

Untuk itu, kami menilai adanya beberapa agenda atau program-program yang penting untuk dipersiapkan pelaksanaannya berkaitan dengan upaya perwujudan RTR Pulau Sulawesi tersebut. Diantaranya adalah **sosialisasi Keppres** oleh masing-masing Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi, serta **penataan kelembagaan penataan ruang di daerah** melalui pembentukan atau pengaktifan kembali Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) sebagaimana telah menjadi Kesepakatan Gubernur se-Indonesia dalam Rakernas BKTRN di Surabaya, 14-15 Juli yang lalu. Selain itu diperlukan pula persiapan terhadap kegiatan **pengawasan dan pengendalian** terhadap pemanfaatan ruang pasca penetapan Keppres RTR Pulau Sulawesi.

*Para Menteri Kabinet Gotong Royong*

*Para Gubernur se-Sulawesi*

*Bapak, Ibu, Peserta Musyawarah Sulawesi II yang berbahagia,*

Sebagai penutup dari paparan singkat ini, perkenankan pula kami menyampaikan ucapan **terimakasih** pada seluruh peserta Musyawarah Sulawesi II atas perhatian yang diberikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkahi seluruh upaya bersama yang terus kita perjuangkan ini.

**Wassalaamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.**

**Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah,**

**SOENARNO**